

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO ILANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON: (021) 3994230 (20 SALURAN) PSW 5200, 5204, (021) 3450959, 3865130 FAKSIMILI: (021) 3846402 SITUS: www.djpbnkemenkeu.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- OOI /PB/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE I TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017, Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan melaksanakan Sertifikas i Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I Tahun 2019 melalui mekanisme sebagai berikut:

A. SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN

I. Mekanisme pengakuan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara dan/atau Sertifikat Profesi Bendahara

Bagi calon peserta yang menduduki jabatan Bendahara dan yang tidak sedang menduduki jabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indones ia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Memiliki salah satu dari sertifikat sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan sebelum tanggal 20 Januari 2016;
 - 2) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya sebelum tanggal 20 Januari 2016;
 - 3) Sertifikat Profesi Bendahara yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) **sebelum tanggal 20 Januari 2016.**

II. Mekanisme Ujian Sertifikasi Internet-based Test (IBT)

Bagi Bendahara dengan masa kerja paling singkat selama 2 tahun:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

III. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi dengan Penyegaran (Refreshment)

Bagi Bendahara dengan masa kerja kurang dari 2 tahun:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Telah memiliki sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat selain BPPK atau sertifikat profesi Bendahara yang masih berlaku namun tidak dapat diakui dan diterbitkan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register, atau tidak memiliki sertifikat diklat bendahara atau sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku.

IV. Mekanisme Ujian Sertifikasi Computer-based Test (CBT) yang terintegrasi Diklat Bendahara

Bagi Calon Bendahara yang tidak sedang mendudukijabatan Bendahara:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- b. Pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
- c. Golongan paling rendah II/b atau sederajat; dan
- d. Pendaftaran dilakukan **hanya melalui BPPK** selaku penyelenggara diklat dan ujian sertifikasi secara kolektif oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1. Pendaftaran Sertifikasi Bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi (UPS) mulai tanggal 11 sampai dengan 31 Januari 2019.
- 2. Pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara dilakukan di Unit Pelaksana Sertifikasi.
- 3. Tata cara pendaftaran Sertifikasi Bendahara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi

Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.05/2017.

- 4. Calon peserta sertifikasi bendahara **wajib** membaca peraturan sebagaimana dimaksud angka 3.
- 5. Format surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan dokumen lainnya yang terkait dengan pendaftaran Sertifikasi Bendahara dapat diperoleh di UPS atau diunduh melalui situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.
- 6. Pengisian surat usulan nama calon peserta sertifikasi bendahara dan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian.
- 7. Adapun ketentuan dan dokumen persyaratan pendaftaran yang perlu disampaikan pada UPS adalah sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Surat usulan nama calon peserta sertifikasi dari kepala satuan kerja; dan
 - b) Softcopy pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah dalam format JPG.
 - 2) Persyaratan Tambahan
 - a) Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh BPPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF;
 - b) Softcopy sertifikat diklat bendahara yang diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat diklat dimaksud, dengan format PDF; dan/atau
 - c) Softcopy sertifikat profesi bendahara yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian bagi calon peserta yang memiliki sertifikat profesi dimaksud, dengan format PDF.
- 8. UPS melakukan verifikasi data calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA dengan alamat http://simserba.kemenkeu.go.id
- Dalam hal data calon peserta yang telah sesuai, UPS menerbitkan dan menyampaikan Username dan password Aplikas i SIMSERBA kepada calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 10. Dalam hal data calon peserta tidak sesuai, UPS mengembalikan surat usulan kepada kepala satker.
- 11. Calon peserta yang telah memperoleh *username* dan *password* Aplikas i SIMSERBA merekam data diri dan mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 melalui Aplikasi SIMSERBA.
- 12. UPS melakukan verifikasi data terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta melalui Aplikasi SIMSERBA.

- 13. UPS menyampaikan hasil verifikasi data calon peserta sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada Unit Penyelenggara.
- 14. Calon peserta dapat melihat status pendaftaran, mekanisme sertifikasi yang diikuti, dan lokasi ujian melalui Aplikasi SIMSERBA.

C. UNIT PELAKSANA SERTIFIKASI (UPS)

Daftar Unit Pelaksana Sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Provinsi	UPS
1.	Aceh	 KPPN Banda Aceh KPPN Lhokseumawe KPPN Meulaboh KPPN Langsa KPPN Tapaktuan KPPN Kutacane KPPN Takengon
2.	Sumatera Utara	 KPPN Medan KPPN Medan II KPPN Tebingtinggi KPPN Pematang Siantar KPPN Padang Sidempuan KPPN Tanjung Balai KPPN Gunung Sitoli KPPN Rantau Prapat KPPN Sibolga KPPN Sidikalang KPPN Balige
3.	Sumatera Barat	 KPPN Padang KPPN Bukittinggi KPPN Solok KPPN Lubuk Sikaping KPPN Sijunjung KPPN Painan
4.	Riau	 KPPN Pekanbaru KPPN Dumai KPPN Rengat
5.	Kepulauan Riau	 KPPN Tanjung Pinang KPPN Batam
6.	Jambi	 KPPN Jambi KPPN Bangko KPPN Sungai Penuh KPPN Muara Bungo KPPN Kuala Tungkal
7.	Sumatera Selatan	 KPPN Palembang KPPN Baturaja KPPN Lahat KPPN Sekayu KPPN Lubuk Linggau
8.	Bandar Lampung	 KPPN Bandar Lampung KPPN Metro KPPN Kotabumi KPPN Liwa

No.	Provinsi	UPS
9.	Bengkulu	 KPPN Bengkulu KPPN Curup KPPN Mukomuko KPPN Manna
10.	Bangka Belitung	KPPN Pangkal Pinang KPPN Tanjung Pandan
11.	Banten	 KPPN Serang KPPN Tangerang KPPN Rangkasbitung
12.	DKI Jakarta	 KPPN Jakarta I KPPN Jakarta II KPPN Jakarta III KPPN Jakarta IV KPPN Jakarta V KPPN Jakarta VI KPPN Jakarta VII
13.	Jawa Barat	 KPPN Bandung I KPPN Bandung II KPPN Bekasi KPPN Bogor KPPN Sukabumi KPPN Cirebon KPPN Tasikmalaya KPPN Kuningan KPPN Purwakarta KPPN Garut KPPN Karawang KPPN Sumedang
14.	Jawa Tengah	 KPPN Semarang I KPPN Semarang II KPPN Surakarta KPPN Pati KPPN Kudus KPPN Pekalongan KPPN Tegal KPPN Purwokerto KPPN Magelang KPPN Klaten KPPN Sragen KPPN Purworejo KPPN Purwodadi KPPN Banjarnegara KPPN Cilacap
15.	D.I. Yogyakarta	KPPN Yogyakarta KPPN Wonosari KPPN Wates

No.	Provinsi	UPS
16.	Jawa Timur	 KPPN Surabaya I KPPN Sidoarjo KPPN Malang KPPN Pamekasan KPPN Bondowoso KPPN Madiun KPPN Kediri KPPN Blitar KPPN Mojokerto KPPN Jember KPPN Bojonegoro KPPN Banyuwangi KPPN Tuban KPPN Pacitan
17.	Kalimantan Barat	 KPPN Pontianak KPPN Singkawang KPPN Sanggau KPPN Ketapang KPPN Sintang KPPN Putussibau
18.	Kalimantan Tengah	 KPPN Palangkaraya KPPN Buntok KPPN Pangkalan Bun KPPN Sampit
19.	Kalimantan Selatan	 KPPN Banjarmasin KPPN Tanjung KPPN Barabai KPPN Pelaihari KPPN Kotabaru
20.	Kalimantan Timur	 KPPN Samarinda KPPN Balikpapan KPPN Tanjung Redeb
21.	Bali	 KPPN Denpasar KPPN Singaraja KPPN Amlapura
22.	Nusa Tenggara Barat	 KPPN Mataram KPPN Sima KPPN Selong KPPN Sumbawa Besar
23.	Nusa Tenggara Timur	 KPPN Kupang KPPN Waingapu KPPN Ruteng KPPN Atambua KPPN Larantuka KPPN Ende

No.	Provinsi	UPS
24.	Sulawesi Selatan	KPPN Makassar I
		2. KPPN Makassar II
		3. KPPN Pare-Pare
		4. KPPN Palopo
		5. KPPN Bantaeng
		6. KPPN Sinjai
		7. KPPN Benteng
		8. KPPN Watampone
		9. KPPN Makale
		9. KPPN Makale
25.	Sulawesi Barat	1. KPPN Mamuju
		2. KPPN Majene
26.	Sulawesi Tengah	1. KPPN Palu
		2. KPPN Poso
		3. KPPN Luwuk
		4. KPPN Tolitoli
		4. References
27.	Sulawesi Tenggara	KPPN Kendari
		2. KPPN Bau-Bau
		3. KPPN Raha
		4. KPPN Kolaka
28.	Gorontalo	KPPN Gorontalo
	Coromano	2. KPPN Marisa
29.	Sulawesi Utara	1. KPPN Manado
		2. KPPN Kotamobagu
		3. KPPN Bitung
		4. KPPN Tahuna
30.	Maluku Utara	KPPN Ternate
00.	Walaka Stara	2. KPPN Tobelo
		Z. RITH TODELO
31.	Maluku	1. KPPN Ambon
		2. KPPN Masohi
		3. KPPN Tual
		4. KPPN Saumlaki
32.	Papua Barat	1. KPPN Manokwari
JZ.	apua Darat	2. KPPN Sorong
00		158 0 2 N 2 N 2 N 3 N 5 N 7 N 7 N 7 N 7 N 7 N 7 N 7 N 7 N 7
33.	Papua	1. KPPN Jayapura
		2. KPPN Merauke
		3. KPPN Biak
		4. KPPN Serui
		5. KPPN Nabire
		6. KPPN Wamena
		7. KPPN Timika
34.	Kalimantan Utara	KPPN Tanjung Selor
		2. KPPN Tarakan
		3. KPPN Nunukan
		5. Til 14 Hallandin

No.	Provinsi	UPS
35.	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BDK Cimahi BDK Yogyakarta BDK Malang BDK Denpasar BDK Manado BDK Makasar BDK Salikpapan BDK Pekanbaru BDK Medan

D. PENGUMUMAN HASIL SERTIFIKASI BENDAHARA

Informasi pengumuman hasil sertifikasi bendahara dapat dilihat pada Unit Pelaksana Sertifikasi dan situs http://www.djpbn.kemenkeu.go.id.

E. LAIN-LAIN

- 1. Penerbitan Sertifikat Bendahara dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara.
- 2. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara melalui telepon: (021) 3846822 atau *e-mail:* sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id atau Unit Pelaksana Sertifikasi setempat.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal o\(\begin{aligned} \text{Januari 2019} \end{aligned}

A.N.DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN,

MMMM-9 SUDARSO 7X